



LESSON LEARNED DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KELAUTAN DI EKOREGION SUNDA KECIL

Putu Oktavia, Uly Faoziyah, B. Kombaitan,
Djoko Santoso Abi Suroso,
Andi Oetomo, Gede Suantika

Email: putu.oktavia@gmail.com

Outline Paparan

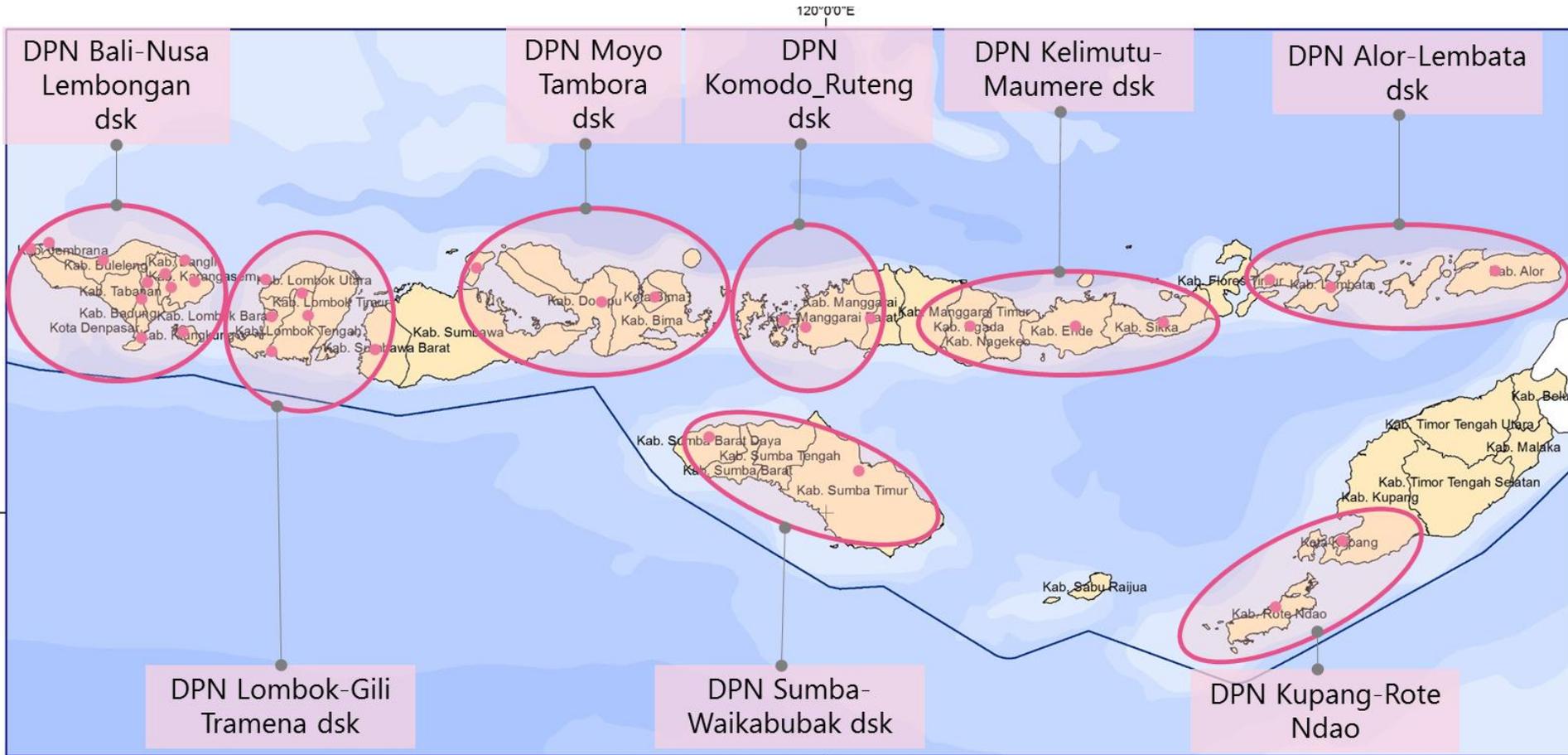
1. Kondisi Ekoregion Sunda Kecil
2. Konsep Penataan Ruang Kelautan Ekoregion Sunda Kecil
3. Tantangan dalam Proses Penyusunan Rencana
4. Lesson Learned
5. Rekomendasi

URGENSI PENATAAN RUANG LAUT DI EKOREGION SUNDA KECIL



KONDISI SAAT INI

Destinasi Pariwisata Nasional: 50 (8).
 Daerah Pengembangan Pariwisata Nasional: 222 (33).
 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional: 88 (22).

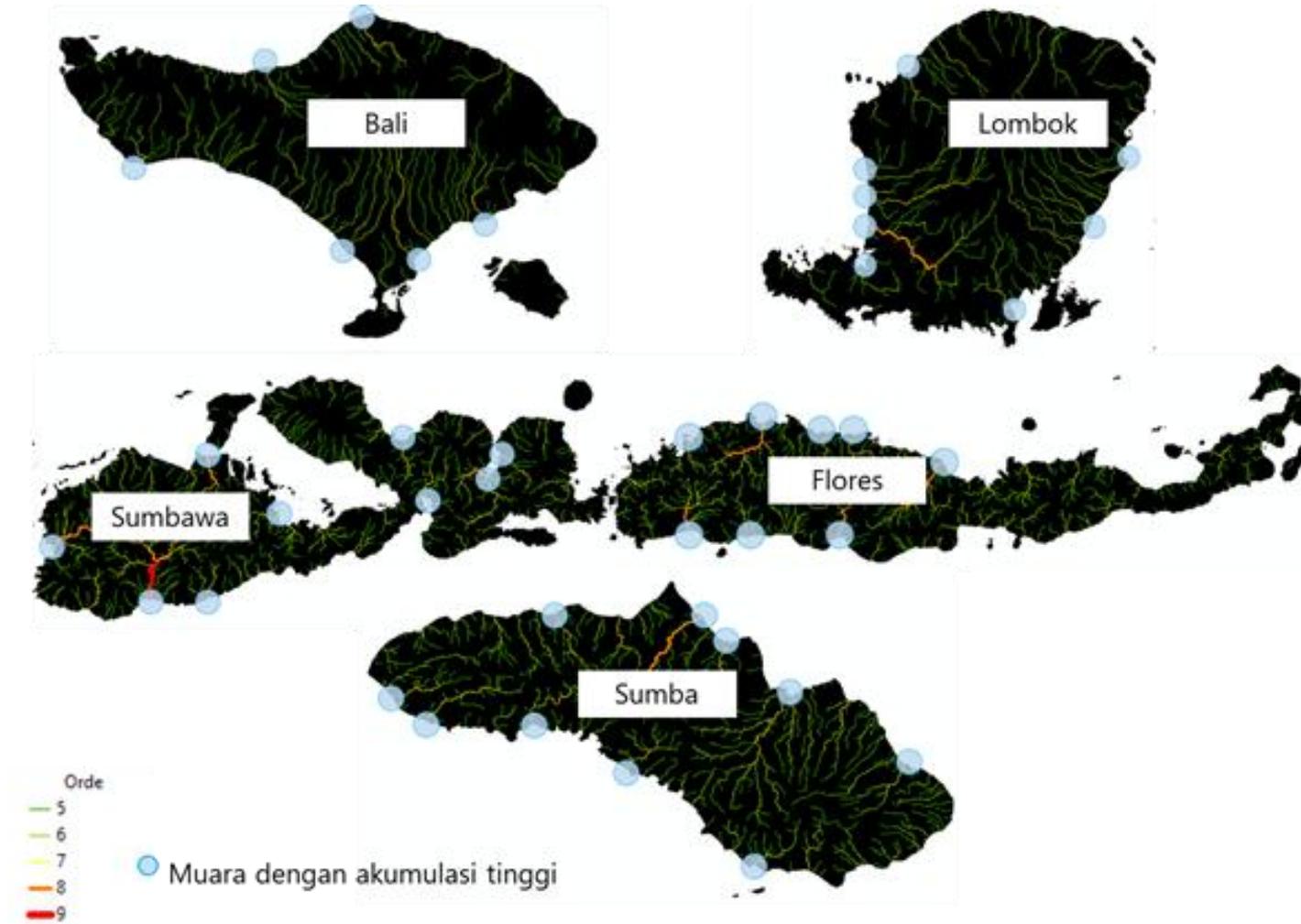


● Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

○ Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

Sumber: PP No. 50/2011 Lampiran II

AKUMULASI AKTIVITAS DARATAN TERHADAP KAWASAN PESISIR



KONDISI SAAT INI

Konsep Penataan Ruang Kelautan Ekoregion Sunda Kecil

- **Ecosystem-based Management**
 - Penataan ruang mempertimbangkan **integrasi antar ekosistem** serta mampu memastikan koordinasi horizontal antar wilayah administrasi
- **Productive Conservation**
 - memadukan antara fungsi konservasi dan pembangunan
- **Performance-based Zoning**
 - suatu kegiatan diizinkan/tidak berdasarkan pada serangkaian kriteria yang menunjukkan kinerja kegiatan tersebut atau standar kinerja tertentu (Stockham, 1974; Porter et al., 1988) dalam rangka pengendalian dampak pemanfaatan ruang tanpa membatasi pemanfaatan kegiatan tersebut

Alasan Pemilihan Performance Zoning

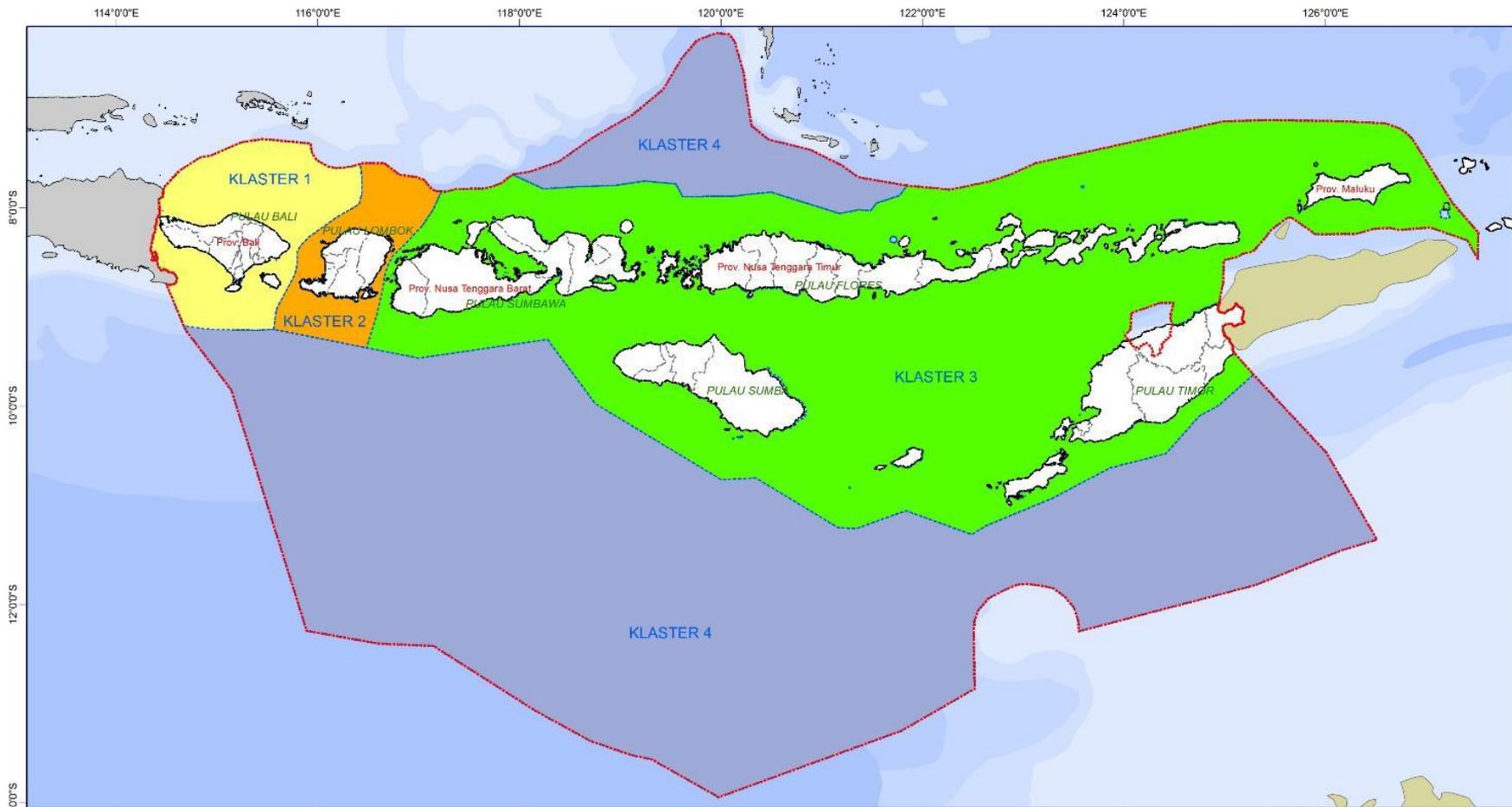
- dapat secara langsung menerjemahkan standar, tujuan dan kepentingan pembangunan
- Hanya membutuhkan sedikit pembagian kawasan ke dalam zona dan memberikan pilihan pemanfaatan ruang yang lebih banyak di dalam zona tersebut
- *Performance zoning* tidak membuat diskriminasi berdasarkan pemanfaatan ruang.
- Memperhitungkan kemampuan suatu kawasan untuk mendukung kegiatan yang diusulkan dan mengizinkan pembangunan hanya jika pembangunan tersebut konsisten dengan standar yang ditentukan.

Pembagian Klaster (1)

KLASTER	KARAKTERISTIK			
	TINGKAT SENSITIVITAS	TINGKAT KEUNIKAN	KONDISI EKSISTING	NILAI JASA LINGKUNGAN
KLASTER 1 (PERAIRAN PULAU BALI)	Sedang	Sedang	Mengalami gangguan dari sedang hingga tinggi, khususnya akibat aktivitas manusia	Nilai ecosystem services yang dinilai penting berkisar 4 – 5 jenis
KLASTER 2 (PERAIRAN PULAU LOMBOK)	Sedang hingga tinggi	Sedang hingga tinggi	Mulai mengalami gangguan dan diperkirakan akan terjadi peningkatan frekuensi gangguan di masa mendatang	Nilai ecosystem services yang dinilai penting berkisar 5 – 8 jenis

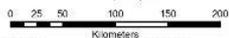
Pembagian Klaster (2)

KLASTER	KARAKTERISTIK			
	TINGKAT SENSITIVITAS	TINGKAT KEUNIKAN	KONDISI EKSISTING	NILAI JASA LINGKUNGAN
KLASTER 3 (PERAIRAN SUMBAWA DAN NTT)	Tinggi hingga sangat tinggi, yakni memiliki spesies endemik yang terancam punah serta habitat dengan kemampuan resilient dan resistansi yang rendah	Tinggi hingga sangat tinggi	Tingkat gangguan rendah	Nilai ecosystem services yang dinilai penting lebih dari 8 jenis
KLASTER 4 (PERAIRAN LAUT DALAM)	Tinggi, akibat kerentanan terhadap bencana yang sangat tinggi dengan jenis spesies yang berbeda dari kawasan lainnya	Tinggi	Tingkat gangguan rendah	Nilai ecosystem services yang dinilai penting lebih dari 8 jenis



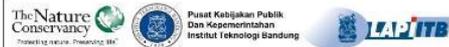
**PETA KLASTER
EKOREGION SUNDA KECIL**

1:4.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : WGS 1984

**APPLYING MARINE SPATIAL PLANNING
IN LESSER SUNDA ECOREGION INDONESIA**



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Ekoregion
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Klaster

Klaster

- Klaster 1 (Perairan Pulau Bali)
- Klaster 2 (Perairan Pulau Lombok)
- Klaster 3 (Perairan Pulau Sumbawa dan NTT)
- Klaster 4 (Perairan Laut Dalam)



KETERANGAN RUMAYAT PETA
 - Batas-batas administrasi nasional diperoleh dari informasi pemerintah daerah setempat
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
SUMBER PETA
 - Hasil Analisis 2016

Tantangan dalam Proses Penyusunan

- Kurangnya data dan informasi yang tersedia untuk perencanaan skala ekoregion
- Kompleksitas sistem alam, sistem tata kelola, serta ketidakpastian akan meningkat seiring dengan peningkatan ukuran kawasan yang direncanakan (Olsen et al., 2011).
- Partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi yang terbatas → masalah legitimasi

Tantangan terkait Peraturan Perundangan

- Posisi RTR skala Ekoregion?
- Kompleksitas dari sisi legal dan kelembagaan

Lesson Learned

1. Kompleksitas pengelolaan lingkungan semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala dan ketidakpastian, terutama terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan.
2. Di tingkat ekoregion, proses perencanaan melibatkan lebih banyak proses ilmiah yang membutuhkan pengetahuan yang lebih beragam tentang ekosistem yang akan dikelola.
3. Tujuan pengelolaan lebih sulit dikomunikasikan kepada stakeholder karena banyaknya sektor dan kepentingan yang terkait.
4. Membangun kesepakatan dan konsensus di antara berbagai kementerian terkait merupakan tantangan signifikan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ruang laut di tingkat ekoregion.
5. Cenderung fokus pada basis ilmiah penetapan kawasan dan tujuan yang lebih umum, sementara implementasi dan isu pengelolaan yang lebih detail (seperti zonasi) seharusnya diserahkan kepada masing-masing daerah yang terkait.
6. Stakeholder hanya bisa dilibatkan dalam proses konsultasi dan terbatas. Pelibatan stakeholder secara langsung akan semakin sulit seiring semakin meningkatnya skala.

Rekomendasi

1. Mengakomodasi konsep ekoregion ke dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia untuk menjamin integritas ekosistem
2. Penataan ruang laut harus dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah darat, pesisir, serta pulau-pulau kecil.
3. Menerapkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif dalam pengelolaan ruang laut.
4. Melakukan upaya penyamaan visi atau persepsi para pemangku kepentingan dalam penataan ruang kelautan dalam berbagai skala
5. Melakukan upaya pengembangan kelembagaan yang terintegrasi dalam pengelolaan ruang kelautan.
6. Melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan ruang laut, serta membangun komitmen dan konsensus antara seluruh stakeholder yang terlibat di berbagai tingkatan skala.

Ucapan Terima Kasih

- Makalah ini disusun dengan menggunakan data-data yang berasal dari kajian berjudul *Applying Marine Spatial Planning in Lesser Sunda Ecoregion* yang dilakukan oleh The Nature Conservancy Coastal and Ocean Program Indonesia bersama dengan Institut Teknologi Bandung.
- Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Glaudy Perdanahardja dan The Nature Conservancy Indonesia Coastal and Ocean Program yang memungkinkan terlaksananya kajian ini.

Terima Kasih

Putu Oktavia
Mahasiswa Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Institut Teknologi Bandung